UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
INTISARI vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Beberapa Penelitian Sebelumnya 11
C. Rumusan Masalah 17
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
A. Komunikasi Organisasi 20
B. Komunikasi Bencana yang Efektif 25
1. Misi dari strategi komunikasi bencana 29
2. Strategi Komunikasi Bencana yang Efektif 34
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasi bencana 46
C. Kerangka Pemikiran 48
Kerangka alur pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 50
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Metode Penelitian 51
B. Lokasi Penelitian 52
C. Teknik Pengumpulan Data 53
D. Teknik Analisis Data 56
E. Validitas 58

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

F. Definisi Konsep dan Operasional 58
G. Pendukung dan Penghambat dalam Penelitian 61
BAB IV GAMBARAN UMUM BPBD DIY 63
A. Kondisi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 63
1. Visi Misi 63
2. Fungsi dan Tugas 66
3. Struktur Organisasi 67
4. Capaian Kinerja BPBD DIY 71
B. Kebijakan Komunikasi di BPBD DIY 73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 77
A. Regulasi dan Aktor-Aktor dalam Pengelolaan Komunikasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 77
1. Sekretariat 77
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 83
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik 91
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 99
B. Strategi Komunikasi Bencana BPBD DIY 106
1. Pra-bencana (Mitigasi) 109
2. Pra-bencana (Kesiapsiagaan) 110
3. Tanggap darurat. 112
4. Pemulihan 114
C. Analisa Strategi Komunikasi Bencana BPBD DIY 114
D. Analisa Kebijakan Anggaran BPBD DIY terkait Pengelolaan Komunikasi Bencana 120
BAB VI PENUTUP 123
A. Kesimpulan 123
B. Rekomendasi Kebijakan 128
C. Refleksi Kritis 131
DAFTAR PUSTAKA 133
LAMPIRAN 141

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Tahapan dalam Manajemen Bencana 29
Tabel II-2. Kriteria Komunikasi Risiko yang Baik 31
Tabel IV-1. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP BPBD DIY Tahun 2014 70
Tabel IV-2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) 71
Tabel IV-3. Pengukuran Kinerja Periode 2013-2017: Review Tahun Anggaran 2015 72
Tabel IV-4. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD DIY dalam LKj Gubernur DIY Tahun 2014 73
Tabel IV-5. Indikator dan Capaian Kinerja Sub Penanggulangan Bencana dalam LKj Gubernur Tahun 2012-2013 73
Tabel V-1. Tabel Hasil Analisa Strategi Komunikasi di Tiap Tahapan Manajemen Bencana 118
Tabel V-2. Alokasi Anggaran Kegiatan Utama Pendukung Pelayanan Informasi Publik BPBD DIY Tahun 2014-2015 121

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1. The Risk Management Cycle 26
Gambar II-2. Risk Management Model 27
Gambar II-3. Objectives of risk communication before, during, and after a hazard event 28
Gambar II-4. Manajemen Komunikasi Bencana 38
Gambar II-5. Kerangka Alur Penelitian 50
Gambar IV-1. Bagan Struktur Organisasi BPBD DIY 68
Gambar IV-2. Tampilan Website BPBD DIY 75
Gambar V-1. Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana 77
Gambar V-2. Tampilan Aplikasi Web SPKB BPBD DIY 80
Gambar V-3. Tampilan website DATAKU 90
Gambar V-4. Tampilan Halaman Peta dalam Website DATAKU 90

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Gambar V-5. Tampilan Halaman Peta Kajian Risiko Bencana dalam Website BPBD DIY 90
Gambar V-6. Pusdalops-PB didalam Struktur Organisasi BNPB..... 94
Gambar V-7. Awal Pembuatan Matrik Daerah Rawan Bencana oleh TRC BPBD DIY..... 97
Gambar V-8. Siklus Manajemen Bencana..... 109

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi kebencanaan yang dijalankan oleh BPBD DIY, atau dengan kata lain kebijakan komunikasi bencana di DIY, terutama dalam hal strategi pengelolaan data dan informasi di BPBD DIY. Penanggulangan bencana mempunyai beberapa tahapan, yaitu prabencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana. Semua proses dalam semua tahapan itu sangat membutuhkan data dan informasi bencana. Pada tahap pra-bencana, misalnya, pembuatan peta rawan bencana tentu salah satu sumbernya adalah data series bencana yang terjadi di daerah terkait. Tindakan tanggap darurat juga merupakan kegiatan yang membutuhkan kajian cepat begitu bencana terjadi untuk mendapatkan data dan informasi mengenai lokasi dan dampak bencana untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi tanggap darurat. Pada masa paska bencana ada program kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi yang hanya bisa dilakukan setelah ada data dan informasi mengenai dampak bencana.

Komunikasi memegang peranan penting hampir di seluruh aktivitas manusia demikian pula dalam penanggulangan bencana, sehingga pengelolaan komunikasi yang efektif harus menjadi perhatian institusi pemerhati bencana terutama institusi pemerintah terkait. Oleh karena itu instansi terkait harus memahami dan menjalankan strategi komunikasi bencana yang efektif tidak hanya pada saat tanggap darurat saat bencana terjadi namun juga harus menjadi

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pertimbangan dan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tiap tahapan penanggulangan bencana. Untuk itu perlu diketahui lebih dahulu secara singkat daftar karakteristik mengenai bencana, manajemen bencana dan proses informasi selama bencana, seperti yang telah disusun dari beberapa literatur (Der Heide, 1989; NRC, 2006; Humanitarian Initiative Harvard, 2011; Quarantelli, 2005) berikut ini: (dalam Shaw, 2013)

1) Bencana jarang terjadi; bencana didefinisikan sebagai suatu peristiwa abnormal atau luar biasa dan diluar kebiasaan. Sehingga ketika bencana terjadi, masyarakat terdampak akan dipaksa untuk melakukan berbagai hal yang belum/tidak biasa dilakukan dan di sisi lain berbagai lembaga terkait penanggulangan bencana juga belum terbiasa/ kurang berpengalaman untuk melakukan kerjasama atau bekerja bersama, sehingga seringkali timbul masalah koordinasi.
2) Bencana mengganggu fungsi organisasi sehingga tak bisa berfungsi secara normal; dampak bencana dialami semua pihak di berbagai sisi, termasuk kinerja instansi dan organisasi yang dibentuk untuk melakukan penanggulangan bencana.
3) Bencana tidak bisa ditebak/ diprediksi; meski dari analisa jaringan pemantauan bencana diketahui akan terjadi kejadian bencana namun tidak secara terperinci dan berbagai perubahan dapat terjadi.
4) Bencana memerlukan upaya gabungan dari banyak aktor; baik pemerintah ataupun non-pemerintah yang dapat menjadi penyebab

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

timbulnya permasalahan tersendiri terutama di bidang informasi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama.

5) Tindakan yang efektif memerlukan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat diverifikasi; sehingga untuk dapat melakukan tindakan secara efektif, semua aktor dalam penanggulangan bencana juga publik terdampak harus memiliki informasi yang relevan, dapat dipercaya dan mutakhir.
6) Banjir informasi seringkali terjadi di saat bencana; para aktor penanggulangan bencana membutuhkan perangkat untuk memproses multi data dari: teks, citra satelit, foto, data sensor, dll, yang kesemuanya sangat dibutuhkan terutama dalam tanggap darurat bencana. Kendala keterbatasan waktu dalam membuat keputusan dan di sisi lain melimpahnya beragam informasi yang harus diproses menjadi tantangan di setiap kejadian bencana. Tekanan informasi tersebut kini semakin bear dan rumit sejalan makin pesatnya kemajuan teknologi yang membuat arus informasi lebih deras dari berbagai macam sumber dan dari lebih banyak orang, termasuk korban bencana dan relawan masyarakat.
7) *Siloing* informasi sering terjadi; biasanya tiap stakeholder penanggulangan bencana hanya terfokus pada kebutuhan informasi kelompok mereka sendiri dan mengabaikan kebutuhan informasi pihak lainnya. Hal ini sebagian karena hambatan teknologi dalam integrasi (misalnya, disebabkan oleh format data yang berbeda-beda)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dan kendala keterbatasan waktu yang terlalu ekstrim, tapi sebagian dikarenakan adanya resistensi organisasi untuk menyediakan data bagi pihak lain. Kebijakan untuk membuka data internal satu instansi untuk instansi pemerintah lainnya itu sendiri terkadang sulit untuk dijalankan, apalagi untuk membuka data ke ratusan organisasi non-pemerintah lainnya, alasannya antara lain: keamanan jaringan, perlindungan kemanusiaan, dan ketidakpercayaan.

8) Media memiliki peran besar dan relevan.

Dapat disimpulkan bahwa bencana adalah fenomena yang kompleks dimana kegiatan dan aktor yang terlibat dalam penanggulangan bencana sangat banyak dan beragam. Kompleksitas tersebut tidak hanya ada pada masa tanggap darurat tapi juga pada tahapan lain dalam manajemen penanggulangan bencana, banyak aktor akan mengambil bagian dengan berbagai peran dan fungsi.

Dongsong Zhang, et. al. (2002) melakukan penelitian yang membuktikan pentingnya pengumpulan dan pengelolaan informasi dalam penanganan bencana. Dalam penelitiannya mengenai kerangka kerja manajemen pendukung proses pengambilan keputusan dalam penanganan bencana/ kerja kemanusiaan, Zhang mengemukakan bahwa tantangan terbesar dalam upaya-upaya penanganan bencana/ kerja kemanusiaan adalah pada kebutuhan akan informasi dan data/ pengetahuan yang sebenarnya tersedia sangat banyak namun sangat luas tersebar dikuasai oleh berbagai organisasi/ pihak. Pada saat proses pengambilan keputusan dalam penanganan sebuah bencana, pengambil kebijakan terkait dituntut untuk memahami permasalahan, memperoleh kompilasi informasi yang relevan,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

membuat penilaian/perhitungan dengan tepat, dan menyusun rangkaian rencana aksi. Dalam situasi tanggap darurat, misalnya saat terjadi bencana alam, terbentuk satu kondisi unik bagi sebuah proses pengambilan keputusan dimana banyak tekanan yang terus semakin besar dan semua harus dihadapi dalam rentang waktu yang sangat singkat dan darurat.

Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam penanggulangan bencana sangat membutuhkan kompilasi data dan informasi yang relevant dan akurat dari beberapa sumber; terbuka atau mudah diakses oleh organisasi yang berkompeten untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana; dan semua itu berlangsung dalam waktu yang singkat (Janssen, et.al, 2010). Dalam kondisi tanggap darurat, sharing informasi yang efektif dapat mencegah terjadinya hal-hal yang lebih buruk dalam penanganan bencana dan korbannya. Sebuah penelitian tentang penanggulangan bencana tsunami menyatakan bahwa minimnya arus informasi adalah penyebab utama ketidakpuasan, kemarahan, dan frustrasi orang-orang yang terkena dampak (Christoplos, 2006, dalam De Lim, 2014). Korban bencana membutuhkan informasi yang cepat, tepat, prioritas, koordinasi, keterpaduan, berdaya guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proletisi. Ketersediaan informasi yang baik tersebut sangat diperlukan untuk membuat keputusan penting demi kelangsungan hidup mereka dan masa depan para korban bencana. Bukti menunjukkan bahwa ada keinginan dan kebutuhan akan informasi, dan korban terdampak akan merasa frustrasi atau putus asa ketika informasi tidak tersedia. Setelah tsunami Aceh tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 160.000 dan membuat 500.000 kehilangan tempat tinggal,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sebuah proyek dirancang untuk mengeksplorasi kebutuhan korban menemukan kekecewaan publik atas ketiadaan informasi yang cukup tentang bantuan dan proses bantuan (CDA, 2006 dalam De Lim, 2014).

Setiap kejadian bencana mempunyai potensi menjadi ancaman atas segala segi kehidupan dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penanggulangan, sesuai amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 alinea keempat, pemerintah mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya. Salah satunya dengan belajar dari berbagai bencana di masa lalu, merekamnya, mempelajari dan membuat perencanaan penanggulangan dan berupaya semaksimal mungkin mengurangi resiko ancaman di masa yang akan datang (Warnars, 2009). Mercer, et.al. dalam Tekauchi, et.al. (2009, dalam Wardyaningrum, 2014) melakukan sebuah penelitian di Ambae Island, Vanuatu yang menggambarkan bagaimana tanda-tanda tentang ancaman bahaya bencana vulkanik yang dituangkan dalam peta risiko bencana tidak dapat dipahami oleh masyarakat lokal. Mercer menyimpulkan bahwa untuk mencapai komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka membangun strategi pengurangan bencana perlu diupayakan untuk membangun cara komunikasi yang memadai dengan menggunakan metode tertentu agar terjalin kerjasama antar ilmuwan dengan masyarakat setempat. Penelitian sejenis juga ada di wilayah DIY yaitu tentang komunikasi pada peristiwa bencana letusan gunung Merapi tahun 2010. Penelitian tersebut menemukan bahwa beberapa istilah yang digunakan pemerintah dalam mitigasi bencana ternyata tidak dikenal oleh masyarakat (Setyarto, 2012 dalam Wardyaningrum, 2014).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pada saat bencana terjadi diperlukan banyak tindakan yang melibatkan banyak aktor bahkan organisasi dalam hal ini BPBD harus bekerjasama dan saling membutuhkan antar berbagai stakeholder lainnya. Sampai saat ini tidak ada dukungan informasi yang terpusat, akurat, akuntabel, cepat dan mudah diakses bagi para pengambil kebijakan penanggulangan bencana terutama pemerintah. Data dan informasi yang ada masih kurang bisa diandalkan dan seringkali berasal dari sumber-sumber yang tak jelas sehingga keputusan dan langkah penanggulangan bencana yang diambil, baik pada tahap pra, saat dan paska bencana, kurang sesuai dengan tuntutan untuk cepat, tepat, prioritas, berdaya guna, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proletisi.

Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan besar dalam membantu proses pengumpulan data dan informasi serta efektivitas strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan akan kecepatan dan keakuratan. Instansi yang bertugas selaku koordinator atau pelaksana penanggulangan bencana menurut UU nomor 24 tahun 2007 adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Instansi tersebut membutuhkan data yang akurat pada saat bencana terjadi dan data mengenai kebencanaan yang terpusat sehingga penanganan bencana bisa dilakukan lebih baik, tepat, cepat, terpadu, dan berhasil guna. Oleh karena itu BNPB dan BPBD harus memiliki suatu sistem yang dapat membantu proses pengumpulan data dan informasi kebencanaan (Indriasari, et.al, 2015).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tingginya kebutuhan internal akan data dan informasi bencana memerlukan pengelolaan data dan informasi yang baik dan akuntabel. Selain itu pihak-pihak non-pemerintah juga banyak yang membutuhkan data dan informasi bencana. Penggunaan sistem informasi dan data kebencanaan berbasis internet dan media sosial juga menjadi satu langkah strategis dalam komunikasi bencana beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi terkini. Salah satu upaya pemerintah terkait hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan aplikasi DIBI yang berbasis teknologi internet, melalui aplikasi tersebut pemerintah menyajikan data dan informasi bencana pada publik, baik bencana alam maupun sosial. Pada tahun 2006 secara resmi DIBI telah dipindahtangankan dari UNDP menjadi aset Pemerintah Indonesia; dan DIBI DIY juga menyusul diluncurkan serta dipindahtangankan kepada pemerintah pada tahun 2009 (SCDRR UNDP, 2009). DIBI di tingkat pusat/nasional terus berjalan namun tidak demikian halnya dengan DIBI DIY yang tidak berjalan optimal sejak dilakukan penataan kelembagaan dan berdiri BPBD DIY pada tahun 2010 bahkan dapat dikatakan DIBI DIY tidak berkembang. Pada saat yang sama, proses pengumpulan dan pelaporan data kejadian dan bencana terus dilakukan secara berkala bahkan harian, namun semua itu berjalan manual dan masih bersifat internal, tidak disajikan dalam DIBI DIY. Pada tahun kedua berdirinya BPBD DIY, aplikasi sistem informasi kebencanaan sebagai sumber data internal BPBD DIY yang selanjutnya akan dikompilasi dalam DIBI DIY baru mulai dibuat namun hingga saat ini link DIBI DIY pada DIBI nasional belum bisa diakses. Mendukung langkah tersebut, Tim dan forum yang bertugas terkait DIBI DIY dibentuk pada tahun 2014, melibatkan berbagai

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pihak terkait, namun ternyata tetap menunjukkan kemajuan berarti dalam pemutakhiran data. Beberapa aplikasi lain yang dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan komunikasi bencana juga dibuat baik oleh BPBD DIY maupun bekerjasama dengan lembaga lain.

Permasalahan yang terjadi dalam DIBI tersebut juga dialami oleh BPBD DIY yang memiliki beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi dan juga website sebagai salah satu sarana berkomunikasi dengan publik. Sebagian besar aplikasi tersebut masih belum berfungsi, sedangkan website bpbd.jogjaprov.go.id sudah cukup intens menyediakan berita dan informasi mutakhir mengenai sekilas kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD DIY namun masih banyak data dan informasi kebencanaan yang belum tersedia didalamnya, antara lain: RPB DIY dan rencana kontinjensi yang sebenarnya telah dibuat oleh BPBD DIY. Papan pengumuman sebagai kewajiban minimal instansi pemerintah juga belum tampak di ruang depan/tunggu BPBD DIY. Semua itu menunjukkan ketidaktersediaan penyediaan informasi berkala dan terbuka setiap saat bagi publik (tanpa harus diminta) di BPBD DIY.

Berdasar uraian diatas, dapat dikatakan bahwa ada indikasi adanya permasalahan dalam penyediaan informasi kebencanaan. Publik seringkali harus menemui kesulitan saat membutuhkan informasi dan bantuan terkait upaya pengurangan risiko bencana ataupun penanggulangan bencana. Pihak swasta yang ingin menyalurkan bantuan salah satunya dalam kasus bencana kekeringan yang hampir setiap tahun dialami oleh beberapa daerah tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga ada yang mengalami kesulitan mendapatkan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

informasi mengenai korban terdampak dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyalurkan bantuan meski telah menghubungi instansi berwenang. Strategi pengelolaan komunikasi bencana yang baik dan efektif harus menjadi prioritas perhatian terutama oleh instansi pemegang otoritas tertinggi koordinasi dalam penanggulangan bencana di DIY.

BPBD DIY sebagai instansi yang kewenangan utama dalam penanggulangan bencana sangat membutuhkan data dan informasi bencana yang cepat, tepat dan *up-to-date*. Namun hingga saat ini penyediaan data dan informasi kebencanaan di BPBD DIY tersebut masih belum memadai baik dalam rangka komunikasi bencana dengan publik dan belum mampu memenuhi kebutuhan berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan bencana di Indonesia. Berbeda dengan data kependudukan dimana instansi yang bertugas menyajikan data tidak mempunyai kegiatan yang bergantung pada data kependudukan, hampir semua kegiatan BPBD DIY membutuhkan data dan informasi kebencanaan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Sedemikian pentingnya fungsi data, informasi, dan komunikasi bencana di satu sisi dan tingginya kompleksitas dalam strategi pengelolaannya membuat tema ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Namun demikian, belum banyak penelitian mengenai pengelolaan data, informasi, dan komunikasi kebencanaan yang dilakukan, sebagian besar penelitian dan kajian tersebut lebih berfokus pada pembuatan dan evaluasi dari aplikasi atau sistem informasi dan komunikasi kebencanaan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STRATEGI KOMUNIKASI BENCANA YANG DIJALANKAN BPBD DIY
DIAN MUTIANINGRUM, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Beberapa Penelitian Sebelumnya

Berbagai riset mengenai data dan informasi kebencanaan selama ini lebih banyak mengenai teknik membuat ataupun evaluasi dari sistem teknologi informasi bencana. Masih belum banyak penelitian mengenai komunikasi bencana maupun mengenai komunikasi bencana, dan beberapa diantaranya sangat menarik untuk memperkaya pengetahuan yang diperlukan dalam penelitian ini. Sebagian dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Jeanne Branch Johsnton dari University of Hawaii melakukan penelitian berjudul *Personal Account From Survivor of the Hilo Tsunamis 1946 and 1960: Toward A Disaster Communication Models*. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan para korban selamat dari bencana tsunami di Hilo pada tahun 1946 dan 1960, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa kejadian melalui pengakuan para korban selamat. Penelitian tersebut menemukan bahwa pada bencana tersebut telah terjadi kesalahan prosedur dan koordinasi pemerintah, sehingga terjadi keterlambatan publikasi informasi ancaman bencana dari Pemerintah melalui beberapa instansi dan kepolisian setempat, Hawaii dan Hilo. Penelitian tersebut juga menemukan telah terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan media massa. Salah satunya adalah pada bencana tsunami tahun 1960, beberapa saat setelah gelombang pertama yang tak begitu besar, media massa menyampaikan berita kepada publik melalui radio di Hawaii bahwa tidak akan ada gelombang besar susulan atau gelombang tsunami dalam satu jam ke depan. Akibatnya, bencana tsunami tersebut memakan banyak korban jiwa (Johnston, 2003).